



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Format Kabinet Menopang Realisasi Visi dan Misi
Tanggal : Selasa, 07 Mei 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PRABOWO-GIBRAN

Format Kabinet Menopang Realisasi Visi dan Misi

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi visi, misi, dan program presiden-wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, salah satunya bertumpu dari struktur kabinet yang dibentuk. Karena itu, jika ada keinginan merombak struktur kabinet, bahkan menambah jumlah kementerian dari jumlah 34 kementerian yang ada saat ini, perlu didasari perencanaan yang matang. Jangan sampai perombakan justru membuat birokrasi menjadi tidak efektif dan efisien.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Sebayyo, saat dihubungi, Senin (6/5/2024), mengatakan, revisi Undang-Undang Kementerian Negara memang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Namun, untuk mengubah undang-undang yang mengatur struktur hingga jumlah maksimal kementerian itu, revisi UU harus dimasukkan dalam prolegnas tahunan.

Hingga kini, pembicaraan terkait hal tersebut belum ada. Namun, bisa saja revisi UU itu dibahas sebelum masa jabatan anggota DPR 2019-2024 berakhir, Oktober mendatang. Masih ada waktu sekitar lima bulan untuk membahasnya.

"Tidak ada yang tidak mungkin (di DPR). Tetapi, kan, harus ada inisiatornya. Nah, karena ini menyangkut kepentingan kabinet, tentunya yang paling tepat itu adalah menjadi inisiatif pemerintah, kalau memang revisi itu ada. Karena pemerintah yang punya kepentingan dan yang tahu apa yang diinginkan dalam rencana lima tahunan ke depan," ujar Firman.

Sebelumnya, muncul isu adanya keinginan dari Prabowo untuk menambah kementerian menjadi 41. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara pun merekomendasikan jumlah yang sama karena ada sejumlah urusan pemerintahan yang diatur dalam UU 1945 yang terwadahi di kementerian yang ada saat ini. Adapun UU Kementerian Negara yang berlaku saat ini, mengatur jumlah maksimal kementerian sebanyak 34. Hanya, usulan penambahan kementerian dinilai tak tepat oleh sejumlah pakar birokrasi. Salah satu alasannya karena di era otonomi daerah seperti saat ini, banyak urusan pemerintahan sudah dipegang oleh pemerintah daerah (Kompas, 6/5/2024).

Menurut Firman, jika kelak ada rencana revisi UU Kementerian Negara, revisi harus didasari perencanaan yang matang. Salah satunya, harus jelas target dari kementerian baru yang ingin dibentuk. "Soal besar atau kecil, ramping atau tidak ramping, itu adalah persoalan lain. Tetapi yang penting itu, target sasaran, dan *output* apa yang mau dicapai dengan kementerian yang ditambah," ucap Firman.

Selain itu, perombakan struktur kabinet harus bisa membuat kerja birokrasi lebih efektif dan efisien. Hal lain yang penting struktur kabinet harus selaras dengan visi, misi, dan program yang ingin dicapai Prabowo-Gibran. Pasalnya, struktur kabinet akan membantu pemerintahan mewujudkan janji-janji Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden lalu itu.

"Jangan sampai kementerian yang begitu menggembung, malah nanti sibuk sendiri, karena bikin organisasi baru di kementerian baru tidak mudah. Jangan sampai masa pemerintahan lima tahun, kemudian selama 1-2 tahun hanya mengurus penambahan struktur organisasi pemerintahan. Kita akan kehilangan waktu," tambahnya.

Sulit koordinasi

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga mengingatkan, jika Prabowo-Gibran ingin merombak struktur kabinet harus mengedepankan reformasi birokrasi. "Artinya misal struktur, kaya fungsi. Struktur ramping tetapi perannya optimal," katanya.

Jika kabinet terlalu gemuk, ia khawatir pemerintahan justru akan sulit berkoordinasi dan bersinergi," ujarnya.

Terkait isu penambahan kementerian dari jumlah maksimal 34, seperti diatur di UU Kementerian Negara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak memungkiri. Ia menganggap kian banyak justru positif. Alasannya, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya. Dibutuhkan peran banyak pihak untuk bisa meraih hasil sesuai sasaran dan menghadapi hambatan yang berpotensi terjadi.

"Jadi, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu tak menepis kritik publik yang menduga penambahan jumlah kementerian merupakan upaya mengakomodasi parpol baru yang akan bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, hal itu justru menjadi masukan yang akan dipertimbangkan dalam pembentukan kabinet.

"Jangan sampai (penambahan kementerian) hanya sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik. Masukan dari masyarakat kami terima, tetapi kewenangan membentuk kabinet,formasinya seperti apa, jumlahnya berapa itu ada pada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," ujarnya. (BOW/NIA)